



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BERBASIS KOMUNITAS

¹Andi Ansar Firman

¹Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 27 Januari 2021

Disetujui 16 Maret 2021

Dipublikasikan 19 Maret 2021

Kata Kunci:

pemberdayaan,
masyarakat desa,
komunitas,
pemberdayaan
masyarakat desa

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan aspek penting dalam upaya ikut memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan melibatkan komunitas masyarakat desa akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan di desa. Kunci dari pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas ini adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal terhadap kegiatan-kegiatan tematik yang dikembangkan di desa. Oleh karena itu, artikel ini mencoba memberikan gambaran konsep pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas dan bagaimana implementasinya di Indonesia secara umum. Metode penelitian dalam kajian ini dilakukan melalui model *literatur review* dengan mengumpulkan artikel dan jurnal terkait pemberdayaan masyarakat yang diterbitkan tahun 2012-2020. Pengumpulan artikel dan jurnal dilaksanakan melalui mesin pencari seperti *Scencedirect*, *Proquest*, dan *GoogleScholar*. Hasil kajian menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas mempunyai dimensi strategis dalam menggali potensi dan pengembangan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan memberikan peran kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada proses formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan tematik di wilayah desanya. Pelibatan komunitas lokal desa akan membangun kontruksi sosial politik yang positif di masyarakat desa dengan semakin memperkuat proses musyawarah dan gotong royong masyarakat desa. Kemudian pada aspek ekonomi dan budaya, pemberdayaan masyarakat desa akan memperkuat peran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pelaku kegiatan di desa. Hal ini akan memperkuat aspek kultur sosial warga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

COMMUNITY-BASED VILLAGE EMPOWERMENT: LITERATURE REVIEW

Abstract (Bahasa Inggris)

Keywords:
empowerment,
village
community,
community,
village
community
empowerment

Empowerment of villagers is an important aspect as an effort to participate in advancing and prospering the village community. By Involving the villagers, people will have a positive effect on development progress in the village. The key to community-based villagers empowerment is the active participation of the local community in thematic activities developed in the village. Therefore, this article tries to provide an overview of the concept of community-based villagers empowerment and how it is implemented in Indonesia in general. The research method in this study was build up through a literature review model by collecting articles and journals related to community empowerment published in 2012-2020. The collection of articles and journals was carried out through search engines such as Scencedirect, Proquest, and Google Scholar. The results of the study explain that community-based villagers empowerment has a strategic dimension in exploring community potential and capacity building. Community empowerment will give the community a role in participating in the process of formulation, implementation, and monitoring and evaluation of thematic activities in their village area. The involvement of the local village community will build positive socio-political construction in the village community by further strengthening the process of deliberation and mutual cooperation of the village community. Then in the economic and cultural aspects, the empowerment of village communities will strengthen the role of the community in participating as actors in activities in the village. This will improve the function of community social control and improve the welfare of the village community itself.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹andi.ansar@kemenkeu.go.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa memegang peranan yang penting dalam upaya membangun kemandirian penduduk desa. Kemandirian tersebut dalam arti mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah proses atau cara, atau pun juga sebagai suatu perbuatan untuk menuju berdaya. Pengertian proses tadi merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap. Serangkaian tindakan ini tentunya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan atau kemandirian.

Pemberdayaan dalam perspektif ilmu sosial sering diartikan sebagai ikhtiar guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh suatu individu atau kelompok masyarakat atau juga masyarakat. Masyarakat sendiri (*community/society*) terdiri dari individu-individu dalam suatu wilayah yang spesifik, memiliki ikatan kebersamaan dan saling berinteraksi secara sosial (Amalia & Syawie, 2015). Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini termasuk didalamnya tingkat aksesibilitas terhadap sumber daya dan aktivitas sosial lainnya. Intinya pemberdayaan menjadi sarana dan suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas/usaha yang positif terhadap untuk membuat suatu aspek dari kondisi atau keadaan tidak berkekuatan atau lemah menjadi berdaya atau kuat (Zaili, et al., 2012). Pemberdayaan berarti memberi energi agar yang bersangkutan dapat untuk bergerak dengan mandiri (Sumodiningrat & Wulandari, 2015). Dalam aspek lain, pemberdayaan juga merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktifitas pembangunan. Upaya tersebut merujuk pada suatu tindakan nyata untuk mengubah masyarakat yang lemah, baik pengetahuan, sikap, dan praktek, menuju pada penguasaan sikap dan mental perilaku serta kecakapan/keterampilan yang baik.

Tujuan dasar dari setiap program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan dapat dilakukan melalui metode pemberdayaan maka kesejahteraan diharapkan dapat tercapai (Muslim, 2012). Keberhasilan pembangunan kehidupan masyarakat bergantung pada sejauhmana masyarakat itu sendiri dan pemerintah mengambil peranan. Kedua pihak tersebut harus saling bersinergi. Ketiadaan keterlibatan masyarakat, membuat proses pembangunan oleh pemerintah tidak akan berlangsung secara optimal. Dalam konteks ini, pembangunan akan membuat outputnya menjadi kurang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Paradigma pemberdayaan mulai dimunculkan diawal tahun 90-an yang mulai melakukan fase pembangunan dengan memetakan pengetahuan dan potensi keterampilan berbasis komunitas. Paradigma ini berkembang didasari oleh timbulnya kesadaran bahwa pembangunan tidak lagi ditentukan hanya oleh pemegang kekuasaan (negara). Kegiatan pembangunan, khususnya yang bertumpu pada teori modernisasi, yang menekankan pada faktor ekonomi guna mendukung kemandirian suatu negara sering kali tidak terwujud (Lindawati, 2012). Maraknya kegiatan pembangunan yang didorong oleh pendekatan teori modernisasi pada kenyataannya belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masrurroh, et al., 2014)

Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dari individu dan komunitas akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kemudian mampu mengubah nasib mereka sendiri (Raynante, et al., 2017). Pengembangan tadi bisa dicapai dengan memberdayakan orang di tingkat individu dengan membangun keyakinan dan kapasitas individu, serta membangun komunitas secara berjenjang melalui tindakan kolektif berdasarkan kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.

Aspek pemberdayaan pada dasarnya adalah konsep pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat *people-centered, participator* (Munawar, 2011). Dalam konteks ini, pemberdayaan dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yakni: pertama, *enabling* yaitu mendorong terbentuknya situasi yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Kedua, *empowering*, memperkuat potensi masyarakat melalui strategi penyediaan input yang membuka peluang masyarakat semakin mandiri. Ketiga, *protecting*, upaya membela dan melindungi kepentingan masyarakat golongan bawah agar tidak semakin termarginalkan.

Barbara A. Israel, et.al dalam kajiannya menyebutkan bahwa komunitas itu didefinisikan sebagai kesamaan rasa emosional yang terkoneksi antar individu dengan nilai, norma, minat yang sama untuk memenuhi kebutuhan bersama (Israel, et al., 2012). Namun demikian perlu juga untuk dicermati bahwa koneksi antar individu atau sering disebut komunitas ini mengacu pada proses dalam mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri (Tengland, 2012). Komunitas ini adalah orang-orang yang memiliki tenaga, waktu dan motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan program. Bisa saja orang-orang ini tidak didukung oleh anggota masyarakat, atau bisa juga hanya sebagian elit saja. Untuk itu diperlukan semacam upaya yang optimal untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang ada.

Salah satu faktor penting dari aspek pemberdayaan masyarakat adalah adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kelompok masyarakat atau komunitas yang ada ditengah masyarakat dalam kerangka pemberdayaan akan menjadi subyek dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat itu penting yaitu: (Maulina, 2012)

1. Partisipasi masyarakat adalah alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, keperluan, dan *attitude* masyarakat, karena tanpa hal ini program serta kegiatan akan sulit berhasil.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai suatu kegiatan atau program bila mereka ikut dilibatkan dalam aspek perencanaan dan persiapannya. Ini dikarenakan mereka

akan mengetahui segala hal terkait kegiatan tersebut dan tumbuh rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut.

3. Asumsi bahwa pelibatan masyarakat dalam program pembangunan mereka sendiri merupakan wujud hak demokrasi. Masyarakat berhak untuk ikut urun rembung guna menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Keterlibatan partisipasi dari masyarakat memungkinkan pemberdayaan menjadi suatu proses yang menciptakan iklim kondusif dalam mengembangkan potensi masyarakat. Hipotesa ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada individu atau masyarakat yang tidak memiliki daya. Bertitik tolak dari hipotesa ini, maka pemberdayaan tidak hanya pada masyarakat yang tidak memiliki kapasitas, tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya namun masih terbatas, dapat dikembangkan untuk menggapai kemandirian.

Implementasi pola kerja pemberdayaan merupakan suatu pedoman untuk perencanaan kerja guna memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi indikator dan mengevaluasi kerja keterlibatan, membantu membuat penilaian tentang apakah proses dan hasil mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pembahasan tentang bagaimana mengembangkan dimensi pemberdayaan masyarakat di tingkat operasional masih kurang, dan masih sedikit upaya untuk menggunakan perspektif desain dalam membangun dan mengembangkan potensi masyarakat.

Masyarakat di tingkat desa juga merupakan satu entitas yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk mandiri, maju, dan berkembang. Ditingkat desa, pengembangan komunitas dan kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan akses masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Badaruddin, et al., 2020). Masyarakat di desa mempunyai kultur dan ragam budaya yang masih cukup kuat mengakar yang memungkinkan upaya pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Melihat cukup luasnya konteks upaya membangun masyarakat khususnya di tingkat desa, maka pemahaman tentang pemberdayaan desa yang berbasis komunitas menjadi sangat penting. Untuk itu dalam *paper* ini akan diulas sejauhmana konsep pemberdayaan masyarakat di desa yang berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini, metode yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, sesuai yang dijelaskan **Creswell** (Creswell, 2014), dilakukan melalui kajian literatur berupa jurnal, buku, dan peraturan yang terkait dengan tema

kajian ini. Di dalam analisis kajian ini, penulis melakukan kajian terkait bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis komunitas.

Pengujian keabsahan data metode kualitatif dalam kajian ini menggunakan pendekatan kredibilitas pada aspek nilai kebenaran yang implementasinya ditinjau dari pengamatan, peningkatan literasi dalam penelitian, triangulasi atas data yang ada (Sugiyono, 2014)

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa secara kualitatif. Hal ini merujuk kepada apa yang dikemukakan Miles (2014) yang memilah analisis data kedalam tiga alur yakni kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, lalu penyederhanaan, dan pengabstrakan, atau transformasi data yang muncul dari studi-studi literatur. Kemudian menyajikan data, serta terakhir menarik kesimpulan atas hasil analisa (Miles, et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Konsep Di Indonesia

Dalam konteks desa, aspek pemberdayaan telah diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 pada ayat 12. Peraturan perundangan tersebut mengatur bahwa model pemberdayaan masyarakat di desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta asistensi yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan bagi masyarakat desa. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang didasari atas peningkatan kualitas individu dari masyarakat itu sendiri.

Undang-undang tersebut diatas juga telah memberi ruang bagi penerapan praktek paradigma baru dalam membangun desa di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi desa-desa untuk mengoptimalkan potensinya sendiri dalam membangun kawasan desa masing-masing. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) mengistilahkan model paradigma pembangunan oleh desa sendiri dengan istilah Desa Membangun. Model desa membangun ini memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang ada yang memberikan arahan atau masukan bagi pembangunan desa. Keterlibatan pemangku kepentingan ini untuk turut memberdayakan masyarakat guna menggali kekuatan potensi desa dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakatnya.

Literatur yang ada dalam konteks pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa adanya kesempatan berupa fasilitasi yang mendorong kemandirian masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemberdayaan itu sendiri. Studi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa faktor pendukung program pemberdayaan adalah masyarakat antusias dan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan (Safwadi, et al., 2020). Kemudian faktor penghambatnya adalah kecenderungan masyarakat untuk pragmatis dengan meminta pendanaan setiap kegiatan yang bersifat fasilitasi seperti misalnya diklat.

Kemudian studi pemberdayaan masyarakat pada kawasan pariwisata Desa Namo Sialang memberikan output bahwa partisipasi masyarakat pada proses perencanaan memberikan hasil yang signifikan (Rachmawati, 2020). Perencanaan dengan pendekatan *bottom-up* untuk pengembangan pariwisata, dimana masyarakat memiliki signifikansi kontrol atas pengembangan pariwisata di desa mereka, survei menunjukkan hasil pemberdayaan yang lebih besar di semua dimensi (ekonomi, psikologis, sosial, dan politik).

Implementasi pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia dapat dipahami dalam beberapa aspek pemikiran. *Pertama*, pemberdayaan diartikan dalam konteks menempatkan posisi keberadaan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus dipandang sebagai subyek (partisipan) yang mampu berinteraksi secara mandiri dan kolektif, Sehingga masyarakat bukan lagi sebatas obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang hanya tergantung pada pemberian dari pihak eksternal saja. Masyarakat mandiri bukan berarti masyarakat itu lepas dari tanggungjawab negara, akan tetapi tugas dan kewajiban negara secara *given* harus tetap diberikan. Negara tentu tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan publik seperti pendidikan kesehatan, transportasi, perumahan, dan sebagainya kepada masyarakat desa. Warga desa yang mandiri sebagai partisipan diartikan sebagai terbukanya kesempatan dan kapasitas warga untuk menggali sumber-sumber daya yang ada dilingkungannya sendiri, kemudian potensi dan inovasi yang bisa dimanfaatkan di desa, menyelesaikan masalah yang timbul secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ruang-ruang publik. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Kementerian Desa PDTT, 2019).

Kedua, pijakan dasar dari pemberdayaan adalah adanya kekuasaan (*power*), sebagai solusi atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menitikberatkan bahwa kekuasaan berkaitan dengan kontrol dan pengaruh. Pemahaman ini berasal dari asumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tetap atau tidak berubah. Kekuasaan pada dasarnya tidak terbatas pada pemahaman diatas.

Kekuasaan tidak bersifat vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam model relasi antar individu manusia. Kekuasaan terbentuk dalam konteks relasi sosial. Oleh karena itu hubungan kekuasaan dan model kekuasaan bisa saja berubah (Suharto, 2005).

Ketiga, konteks pemberdayaan terbentang dari proses sampai dengan visi ideal. Ditinjau dari aspek proses, masyarakat sebagai subyek bertindak secara kolektif dalam mengembangkan potensi dan kreasi inovasi, memperkuat daya tawar warga, dan mencapai kemandirian. Dari aspek visi ideal, proses yang ada hendaknya mencapai kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam menyuarakan, mengakses, dan mengontrol lingkungan, komunitas, dan sumberdaya, serta relasi sosial politik dengan pemerintah. Proses untuk menggapai visi ideal ini harus tumbuh dari bawah dan dari internal masyarakat sendiri. Namun demikian dalam kondisi struktural yang timpang, masyarakat cukup sulit membangun kekuatan dari bawah dan dari dalam, sehingga membutuhkan dukungan dari pihak luar.

Intervensi pihak luar seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan sebagainya kepada suatu komunitas masyarakat bukanlah untuk mendikte atau untuk menentukan. Namun hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk fasilitator atau katalisator untuk memudahkan, mengorganisir, menggerakkan, menghubungkan, mendorong, membangkitkan, memberi ruang, dan seterusnya di dalam komunitas itu sendiri. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, menghormati satu sama lain, saling percaya, transparan, dan juga saling belajar untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama.

Keempat, aspek pemberdayaan dimulai dari level psikologis-individu masyarakat sampai ke level struktural kolektif masyarakat. Sasaran pemberdayaan adalah kelompok masyarakat desa, yang mencakup kegiatan yang mewadahi warga secara individual maupun komunitas lokal yang ada secara kolektif. Kata kunci dari pemberdayaan adalah pendekatan partisipatif dan belajar bersama untuk mengangkat kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas setempat. Dari aspek strategi, pendekatan, dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal sebagai bagian dari kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.

Alasan pemikiran pemberdayaan masyarakat dilevel perdesaan adalah memajukan kapasitas masyarakat desa untuk mampu secara mandiri mengelola urusan komunitasnya. Dalam hal ini, Peraturan perundangan terkait desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh penduduk desa untuk aktif terlibat dalam mengelola, mengurus, dan mengatur kehidupan di desa.

Pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat juga mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan publik. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan aspek politik. Politik dalam pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan transformasi sisi politik ke dalam aksi nyata, khususnya menghadirkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui demokrasi musyawarah untuk mufakat, setiap penduduk desa mempunyai kesempatan guna berpartisipasi dalam pembangunan sesuai norma hidupnya masing-masing.

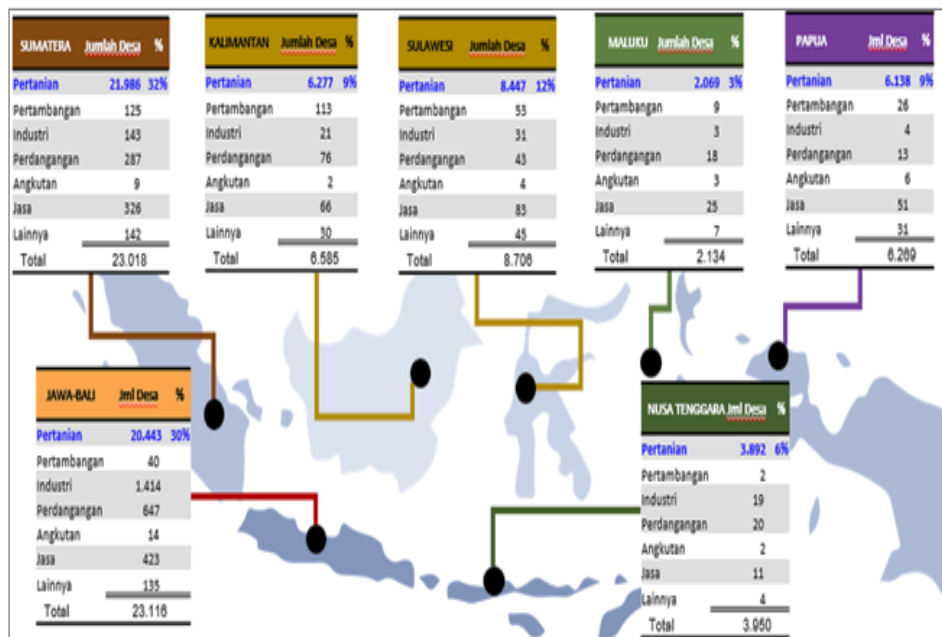
Pemberdayaan Masyarakat Desa Basis Komunitas, Praktik Di Indonesia

Faktor penting dari implementasi pemberdayaan masyarakat desa dengan berbasis pada komunitas lokal desa adalah adanya potensi desa dan partisipasi warga. Peran pihak luar akan lebih optimal dengan bertindak sebagai fasilitator sekaligus motivator yang mendorong kapasitas dan kompetensi warga dalam mengelola potensi desanya. Komunitas lokal desa berarti mengajak masing-masing individu yang ada di dalam suatu komunitas level desa untuk berperan serta memanfaatkan potensi yang menjadi keunggulan di area desanya.

Tujuan umum dari partisipasi komunitas masyarakat desa adalah untuk menciptakan proses aktif dalam kelompok warga desa tersebut yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, daripada hanya sekedar menerima bagian dari manfaat suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan proses aktif termasuk pemberdayaan, pembangunan kapasitas penerima, peningkatan efektivitas, peningkatan efisiensi, dan penghematan biaya dari suatu program atau kegiatan (Suroto, et al., 2020).

Ada cukup banyak potensi desa yang dapat digali untuk kemudian dikembangkan oleh komunitas masyarakat di desa. Cakupan wilayah yang luas dengan potensi yang beraneka ragam membuat kesempatan bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan optimal akan memberikan dampak yang positif. Kondisi geografis desa yang umumnya mengandalkan pada komoditas pertanian dan sumber daya alam (*natural resources*) menjadi potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan secara kolektif oleh warga desa. Sebagaimana terlihat pada gambar 1, peta potensi desa di seluruh Indonesia memperlihatkan ragam keunggulan yang menjadi sumber penghasilan utama warga desa di Indonesia.

Gambar 1
Potensi Desa dan Jumlah Desa Per Pulau Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama



Sumber: Jumlah Desa dengan penghasilan utama, Data Podes, BPS 2014

Dari total jumlah sebanyak 69.252 desa diseluruh Indonesia, terdapat sebanyak 42.429 dengan dengan potensi pertanian. Sebanyak 21.986 desa atau 32% dari jumlah seluruh desa berada diwilayah sumatera, kemudian 20.443 desa (30%) terdapat di jawa dan bali, dan 26.823 desa (38%) tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selain itu juga cukup banyak potensi di bidang lain semisal pertambangan, industri skala desa, hingga penyediaan jasa yang tersebar cakupan di wilayah-wilayah desa seluruh Indonesia.

Salah satu contoh implementasi pengembangan potensi desa yang dapat dijadikan model pemberdayaan di tingkat adalah mengelola wisata desa dengan konsep community based tourism. Konsep community based tourism pada dasarnya juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat yang wilayahnya memiliki potensi pariwisata dan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Febriandhika & Kurniawan, 2019). Penelitian terhadap kawasan wisata Taman Nasional Komodo (Asriyani & Verheijen, April 2020), membuktikan bahwa keterlibatan secara langsung masyarakat lokal memberikan dampak positif terhadap kelestarian dan konservasi lingkungan Pulau Komodo, menjaga habitat asli hewan Komodo, dan mengembangkan wisata di lokasi tersebut.

Begitu besarnya potensi sektor jasa dikawasan perdesaan di seluruh Indonesia, menjadikan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi wisata desa dapat memberikan output yang maksimal. Pengembangan kawasan desa wisata

menjadi sangat dapat dilakukan dengan memadukan unsur daya tarik wisata desa, unsur kearifan lokal desa, dan penyediaan aksesibilitas dan sarana yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa akan menjadi faktor pendorong pembangunan sumber daya manusia yang mau berpartisipasi dalam membangun dan menggerakkan desa. Dalam norma yang lebih luas keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa memungkinkan masyarakat desa menjadi mandiri dan dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa itu sendiri.

Jika kita tinjau lebih jauh, pengembangan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari eksistensi warga desa dan beragam komunitas yang ada didalamnya. Hal ini mengingatkan model pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas wisata memberikan peluang kepada warga desa lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam pengelolaan pembangunan pariwisata. Keuntungan yang dirasakan bukan hanya terhadap warga yang terlibat langsung, namun masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata juga akan mendapatkan benefit dan manfaat. Dalam aspek lain pemberdayaan akan menghasilkan distribusi keuntungan kepada komunitas warga desa yang kurang beruntung (Nurhidayati, 2007).

Upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata mulai digagas pemerintah pusat dengan menetapkan pilot project desa wisata. Pilot project desa berjumlah 10 (sepuluh) desa yang tersebar di 8 (delapan) provinsi pada 9 (sembilan) kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Program piloting desa wisata tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa. Selain itu program menuntut peran pemerintah daerah guna melakukan berbagai inovasi pengembangan kegiatan yang menjadikan desa semakin memiliki daya tarik wisata. Salah satunya dengan membuat beragam kegiatan dan festival yang mengedepankan aspek sumberdaya alam dan budaya yang disinergikan dengan program pengembangan pariwisata ditingkat pusat sehingga diharapkan mampu menarik jumlah wisatawan semakin meningkat. Kesepuluh desa program pilot project tersebut sebagai tercantum dalam tabel I dibawah ini.

Tabel I
Lokasi *Pilot Project* Pengembangan Desa Wisata 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Potensi wisata
1	Sumatera Utara	Samosir	Palipi	Simbolon Putra	Pemandangan alam
2	Sumatera Utara	Samosir	Sianjur Mula-Mula	Huta Ginjang	View Dana Toba
3	Kep. Bangka Belitung	Belitung	Sijuk	Terong	Desa wisata kreatif
4	Banten	Pandeglang	Cipeucang	Cikadeun	Wisata religi
5	Jawa Tengah	Magelang	Borobudur	Wanurejo	Wisata budaya, Borobudur
6	Jawa Tengah	Boyolali	Sambi	Sambi	Pemandangan alam & Kuliner
7	Jawa Timur	Lumajang	Senduro	Ranupani	View Gunung Semeru
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Pringgasele	Pengadangan	Wisata Gunung Rinjani
9	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Sano Nggoang	Liang Dara	Wisata budaya, <i>ecotourisme</i>
10	Maluku Utara	Kep. Morotai	Morotai Timur	Buho Buho	Wisata pantai

Sumber: Direktorat Sarana & Prasarana Ditjen PPMD, 2017 (data diolah)

Pengembangan potensi desa berbasis komunitas akan lebih sukses jika berfokus pada unsur kearifan lokal dan daya tarik unggulan yang menjadi ciri desa dan masyarakat lokal itu sendiri. Tentu saja hal ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah, pihak swasta, lembaga-lembaga non pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar dapat mewujudkan pengembangan potensi desa yang lebih optimal. Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada komunitas saja, melainkan juga pada pemerintah dan pihak lain selaku fasilitator dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas pada dasarnya merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan warga desa yang difasilitasi oleh pemangku kepentingan selaku pihak eksternal. Proses pemberdayaan juga membutuhkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara masyarakat desa dengan potensi warga desa termasuk juga dengan aspek sosial politik, ekonomi, dan kearifan lokal masyarakat desa. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan pola partisipasi dan penggalian potensi desa. Model pendekatan pemberdayaan ini komunitas desa memainkan peran penting. Hal ini disebabkan fokus utama dari pemberdayaan komunitas desa adalah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa menuju kemandirian ekonomi warga setempat.

Pemaknaan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas dalam suatu program atau kegiatan adalah:

1. Munculnya ide dan gagasan perencanaan program atau kegiatan hendaknya dilakukan oleh masyarakat desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal dan potensi desa yang ada. Pemerintah dan pihak lain sebagai pemangku kepentingan hanya memberikan fasilitas konsultasi, informasi, anggaran, dan sebagainya.
2. Masyarakat desa mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan memperhatikan potensi desa yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintah atau lembaga lainnya.
3. Basis komunitas memberikan makna bahwa pemberdayaan bersifat spesifik terhadap skala kegiatan yang menjadi unggulan di desa, baik dari sektor pertanian, industry skala desa, hingga aspek jasa lainnya, termasuk pariwisata, dan pengembangan potensi lainnya.
4. Kemanfaatan hasil kegiatan tentunya ditujukan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam sistem sosial dimana warga desa bertempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D. & Syawie, M., 2015. Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, Vol.1(No.02), pp. 175-186.
- Asriyani, H. & Verheijen, B., April 2020. Protecting the Mbau Komodo in Riung, Flores: Local Adat, National Conservation, and Ecotourism Development. *Forest and Society*, Vo.4((1)), pp. 20-34.
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E. & Sudarwati, L., 2020. Village Community Empowerment Through Village Owned Enterprise Based on Social Capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, pp. 1-13.
- Creswell, J. W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition ed. s.l.:SAGE Publication Inc..
- Febriandhika, I. & Kurniawan, T., 2019. Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community Based Tourism: Sebuah Review Literatur. *Journal of Public Sector Innovation*, Mei, Vol.3(No.2), pp. 50-56.
- Israel, B. A., Euginia, E., Schulz, A. J. & Parker, E. A., 2012. Methods for Community-Based Participatory Research for Health, 2nd Edition. In: *Public Health Behavior & Education*. 8-9: s.n., pp. 149-170.
- Kementerian Desa PDTT, 2019. *Modul KKN Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Puslitbang, Kementerian Desa PDTT.
- Lindawati, L., 2012. Kegagalan Pembangunan di Indonesia. 7th Februari, pp. <https://lisalinda.staff.ugm.ac.id/2012/02/07/kegagalan-pembangunan-di-indonesia/>.
- Masruroh, Y., Supono, Zuber, A. & Solikatun, 2014. Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume Vol 3 (1), pp. 70-89.
- Maulina, A. S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Journal of Regional and City Planning*, Vo.23(3), pp. 177-196.
- Miles, M. B., Huberman, A., Michael & Saldafia, J., 2014. *Qualitative Data Analysis - A Methods Source Book*. 3th Edition ed. s.l.:SAGE Publication Inc..
- Munawar, N., 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol.1(No.2), pp. 87-99.
- Muslim, A., 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru Press.
- Nurhidayati, S. E., 2007. Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol.10(No.3).
- Rachmawati, E., 2020. *Tourism and community empowerment at Gunung Leuser National Park, Indonesia*. s.l., IOP Publishing.
- Raynante, B., Bratton, M. & Hein, L., 2017. From First-to Third-Order Social Change in Development Engineering: A Case Study. *IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, 25 Desember.
- Safwadi, I. et al., 2020. A Study of Community Empowerment Program in ACEH BESAR District, Indonesia. *Talent Development & Excellence* , Vol.12(No.3), pp. 2785-2793.

- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta Press.
- Suharto, E., 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. & Wulandari, A., 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suroto, A., Heripracoyo, S. & Irwansyah, E., 2020. *Community Participation in Development of Spatial and Tabular Villages Database in Indonesia (Case Study: Poncol Pekalongan, Central Java)*. Bandung: 2020 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), IEEE.
- Tengland, P.-A., 2012. Behavior Change or Empowerment: On the Ethics of Health-Promotion Strategies. *Public Health Ethics*, Vol.5(No.2), pp. 140-153.
- Zaili, R. et al., 2012. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.3(No.2), pp. 67-72.